

The Effect of Implementing Government Accounting Standards, Internal Control Systems and The Use of Information Technology on The Quality of Financial Reports in Jambi Province Regional Government Organizations With Organizational Commitment As a Moderating Variable

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Oleh:

Ade Luthfya^{1*)}, Sri Rahayu²⁾, Rita Friyani³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Tahun 2023, Jambi – Indonesia

^{2&3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email: luthfyadeluth@gmail.com^{1*)}, srijambi@gmail.com²⁾, rita_friyani@unja.ac.id³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 18 Desember 2024

Artikel Diterima: 08 Februari 2025

ABSTRACT

Accounting has now increasingly developed in the era of globalisation, especially financial reporting which is very important. The purpose of this study was to test and obtain empirical evidence on the Effect of Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems and Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Statements in Jambi Province Local Government Organisations with Organisational Commitment as a Moderating Variable. The research sample used Purposive Sampling technique. The quantitative method used as an analytical approach has a manifestation to test and verify a theory, positioning the theory deductively to become a benchmark for determining and solving a problem in research. The subjects of this study were Regional Apparatus Organisations located in Jambi Province. Sampling of employees related to the preparation of financial reports, data collection by distributing questionnaires with the number of respondents was 93 people. The results of this study found that the application of government accounting standards and the use of information technology had an effect on the quality of financial reports, while the internal control system had no effect. Organisational commitment is able to moderate the influence between the internal control system and the use of technology on the quality of financial statements, while organisational commitment is not able to moderate the influence between government accounting standards on the quality of financial statements.

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Reports, Organizational Commitment.*

ABSTRAK

Akuntansi kini telah semakin berkembang dalam era globalisasi, terutama pelaporan keuangan yang sangat penting. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terhadap Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Sampel penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Metode kuantitatif yang digunakan sebagai pendekatan analisisnya memiliki tujuan untuk menguji dan memverifikasi suatu teori, memposisikan teori tersebut secara deduktif menjadi patokan untuk menentukan dan memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Subjek dari

penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Jambi Pengambilan sampel pada pegawai yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dengan jumlah responden adalah 93 orang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh. Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik Indonesia kini semakin berkembang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, begitu pula dengan harapan publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari reformasi manajemen pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu upaya yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah alat untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah agar publik dapat mempercayainya. Hal ini dilakukan karena banyak pihak yang memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan. Tentunya keputusan yang diambil merupakan sebuah harapan pemerintah agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Mewujudkan hal itu tentu pemerintah daerah harus membuat kualitas laporan keuangan yang akan memperlihatkan seberapa pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan administrasi dan asas yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kepatuhan standar akuntansi dan dukungan dari sistem akuntansi yang handal ini untuk berpengaruh terhadap kualitas laporan..

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian proses dalam mengumpulkan, mencatat dan mengikhtisar data serta laporan keuangan yang mempertanggungjawabkan atas terlaksananya Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD). Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang akuntabilitas dan transparansi ini dibutuhkan Sistem Keuangan Keuangan Daerah.

BPK sejak tahun 2007 melakukan reviu pada transparansi fiskal dalam mendukung pemeriksaan LKPP. Hasil pemeriksaan dalam IHPS I Tahun 2022 atas 541 (99%) LKPD Tahun 2021 dari 542 pemerintah

daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Selain memberikan opini, BPK juga mengemukakan bahwa telah mendapatkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPI dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. BPK memberikan rekomendasi dan mengemukakan hasil dari temuan tersebut agar dimasa mendatang dapat dilakukan perbaikan.

Jika dilihat dari pencapaian tahun 2020, jumlah LKPD Tahun 2021 yang mendapatkan opini WTP mengalami peningkatan. Pada LKPD Tahun 2020, sebanyak 486 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2021 ada berjumlah 500 dari 541 LKPD yang mendapatkan opini WTP.

Meskipun pada tahun 2021 jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP naik dibanding LKPD Tahun 2020, tetapi terdapat 10 dari 541 (2%) LKPD yang mengalami penurunan opini.

Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK tetap mengungkapkan 27 temuan yang telah dikemukakan dalam LHP atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) dan merekomendasikan perbaikan untuk masa mendatang.

Hasil Pemeriksaan yang ditampilkan dalam IHPS I Tahun 2020 atas 541 (99%) LKPD Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Terhadap 541 LKPD Tahun 2019 tersebut, BPK memberikan 485 opini WTP (90%), 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%).

Tidak hanya sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang menerima opini WTP, Pemerintah Provinsi Jambi turut mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan tahun 2021. Hal ini membuat Provinsi Jambi mendapatkan opini WTP 10 kali berturut-turut. Meski

demikian masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi dari hasil temuan mengatakan terdapat 199 permasalahan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 terdiri dari 86 masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 113 masalah ketidakpatuhan pada peraturan peundang-undangan serta rekomendasi sebanyak 347.

Suatu entitas dalam menjalankan kegiatan memerlukan suatu sistem pengendalian internal agar dapat mewujudkan target yang diinginkan. Begitu pula dalam pemerintahan, sistem itu dinamakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memiliki tujuan yaitu untuk menaruh keyakinan yang cukup dalam mencapai manfaat serta dapat mencapai tujuan terselenggaranya pemerintah yang efisien, pelaporan keuangan yang andal, aset yang aman, serta aturan dan undang-undang yang ditaati.

Adapun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan variabel yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Adapun (Fathia et al., 2020) melakukan sebuah penelitian yang meneliti terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas keuangan yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian (Imelia et al., 2021) menunjukkan hasil hubungan yang positif secara signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan (Destipa Imelia, 2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan Membuktikan Terdapat Pengaruh Positif yang Signifikan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi Dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Berikutnya penelitian (Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung & Novita Indrawati, 2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). Hasil penelitian bahwa Sistem pengendalian internal,

pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
2. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
4. Pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
5. Pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
6. Pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Kualitas Laporan Keuangan

Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: Memberikan alokasi,

penggunaan sumber daya keuangan dan informasi, Memberikan informasi tentang apakah penerimaan periode cukup untuk membayar semua pengeluaran, Memberikan informasi pencapaian hasil kegiatan entitas tersebut berapa sumber daya yang telah dipakainya, Memberikan informasi dalam kegiatan entitas tersebut apakah pendanaan kas cukup atau tidak, Memberikan informasi tentang posisi keuangan dan keadaan entitas pelaporan berhubungan dengan sumber penerimaan yang bersumber dari pajak atau pinjaman baik jangka pendek ataupun panjang, Memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan dari kegiatan selama periode laporan, baik apakah itu mengalami kenaikan atau penurunan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 karakteristik dari laporan keuangan pemerintah yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami

2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah prinsip dari akuntansi yang diterapkan dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Jadi SAP dapat dikatakan merupakan suatu syarat berkekuatan hukum dalam usaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia (Pujanira, 2017).

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum merupakan salah satu cara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu negara atau daerah. Pelaksanaan APBN/APBD dipertanggungjawabkan dengan laporan yang dibuat serta ditampilkan dengan mengikuti standar peraturan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

2.3. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang berintegrasi pada perilaku dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus secara berulang oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang cukup atas tercapainya target organisasi dengan melakukan aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa untuk melanjutkan penyelenggaraan jalannya pembentukan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance). Selain itu didukung juga dalam (PP No. 65 Tahun, 2010) Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan dari teknologi informasi untuk peningkatan dalam kemampuan mengelola keuangan daerah, serta penyaluran dalam Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

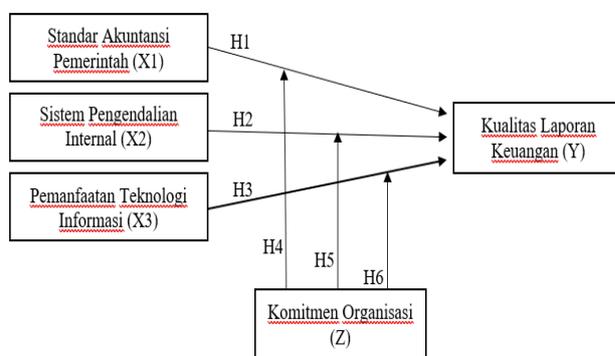
Pemerintah Pusat juga Daerah mempunyai keharusan dalam pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi yang maju agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, serta dapat kepada pelayanan publik tentang Informasi Keuangan.

2.5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu sikap, tingkah, atau perlakuan pegawai yang memiliki tujuan, nilai dan target organisasi yang diperlihatkan dengan adanya sebuah penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki kemauan dalam bekerjasama dengan organisasi dan bersedia untuk bekerja lebih keras dalam organisasi sehingga individu tersebut menjadi ingin untuk tetap dan terus bertahan dalam organisasi tersebut demi dapat mewujudkannya tujuan dan keberlangsungan hidup dari organisasi itu sendiri. Komitmen organisasi digambarkan dalam skala komitmen organisasi (Sumarni & Pramuntadi, 2019). Menurut Schultz (1993), komitmen organisasi memiliki aspek yaitu: (1) nilai serta tujuan organisasi yang diterima (2) bersedia melakukan sesuatu untuk organisasi dengan usaha yang keras dan (3) berkeinginan dalam membentuk afiliasi dengan organisasi.

2.6. Model Penelitian

Dari variabel-variabel tersebut maka dapat ditarik hubungan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Gambar 1. Model Penelitian

2.7. Hipotesis

H₁ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

- H₂ = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
- H₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
- H₄ = Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
- H₅ = Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan
- H₆ = Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian kausal yang digunakan pada penelitian ini merupakan desain kausal yang memiliki fungsi dalam menganalisa suatu variable yang dapat memberikan pengaruh pada variable lainnya (Sugiyono, 2019). Metode kuantitatif yang digunakan sebagai pendekatan analisisnya memiliki tujuan untuk menguji dan memverifikasi suatu teori, memposisikan teori tersebut secara deduktif menjadi patokan dalam menentukan dan memecahkan suatu masalah dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014)

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah variabel yang memiliki keterkaitan dalam penelitian yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen serta komitmen organisasi sebagai Variabel Moderating. Subjek dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Jambi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang terdiri dari data kuantitatif, berupa sebuah skor ataupun nilai dari jawaban yang akan responden berikan pada pertanyaan dalam kuesioner yang nantinya akan diberikan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

3.3. Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini Organisasi Perangkat Daerah, yaitu berupa Dinas dan Badan yang berjumlah sebanyak 31 di Provinsi Jambi. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik pengambilan sampel yang diambil menurut kriteria tertentu.

Responden yang akan dipilih merupakan orang yang bertanggung jawab pada proses pembuatan sebuah laporan keuangan pada masing-masing badan dan dinas dan bagian-bagian tersebut adalah suatu elemen yang sangat penting dalam membuat suatu laporan keuangan pada instansi pemerintah dikarenakan keterlibatannya secara langsung dalam membuat laporan keuangan dan sangat paham mengenai segala aktivitas akuntansi yang dilakukan dalam lingkungan kerjanya. Responden dalam penelitian ini adalah kasubag keuangan, staf sub bagian keuangan dan bendahara keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang berjumlah 93 orang.

3.4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari dinas daerah Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para responden. Kuesioner disebar kepada para responden mulai tanggal 13 November 2023 dan akan dikumpulkan dua minggu setelahnya.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variable Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan pendek atau panjangnya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila dipakai dalam mengukur maka akan memberikan sebuah data kuantitatif. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.

Operasional variabel pada penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2012) variabel independen ialah suatu variabel yang memiliki pengaruh atau yang akan menjadi suatu sebab dari perubahannya atau timbulnya dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintah (X₁), Sistem pengendalian internal (X₂) dan pemanfaatan teknologi informasi (X₃). Variabel dependen ialah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat dari variabel independen. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y) dan variabel moderating adalah komitmen organisasi (M). Variabel harus bisa diartikan dengan cara operasional agar tidak sulit dalam mencari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya.

3.5.1. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (PP No 71 Tahun 2010) agar tujuan dari informasi akuntansi dapat mewujudkan tujuannya, ada ukuran-ukuran normatif yang harus dipenuhi dalam karakteristik sebuah laporan keuangan.

3.5.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan (PP No 71 Tahun 2010)

3.5.3. Sistem Pengendalian Internal

proses yang berintegrasi pada perilaku dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus secara berulang oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan yang cukup atas tercapainya target organisasi dengan melakukan aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 tahun 2008)

3.5.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perlakuan penggunaan teknologi informasi bagi para akuntan yang menggunakannya dalam menyelesaikan tugas dan untuk menambah tingkat kinerjanya (Edlin, 2018)

3.5.5. Komitmen Organisasi

Keyakinan dan pengakuannya dalam menerima yang kuat terhadap target dan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi. Memiliki kemauan yang tinggi dalam

berusaha agar dapat terwujudnya kepentingan organisasi, dan Keinginan yang kuat dalam mempertahankan posisi yang ia miliki sebagai anggota dari organisasi tersebut (Hartni, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data Penelitian didapatkan dengan cara memberikan kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berjumlah sebanyak 31 kantor di Provinsi Jambi. Penyebaran kuesioner ini dilaksanakan secara langsung pada tanggal 13 November 2023 dengan batas pengambilan 2 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 93, kuesioner yang telah kembali adalah sebanyak 81 dan semuanya dapat digunakan. Adapun sejumlah 12 kuesioner tidak dapat kembali dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan respon dan jawaban..

4.2 Statistik Deskriptif

Tujuan dari statistik deskriptif adalah agar dapat memberikan sebuah gambaran tentang variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	81	2,92	5,00	4,3067	,41983
Sistem Pengendalian Internal	81	3,20	5,00	4,0012	,40942
Pemanfaatan Teknologi Informasi	81	3,50	5,00	4,5432	,38687
Kualitas Laporan Keuangan	81	2,90	5,00	4,6160	,36485
Komitmen Organisasi	81	3,00	5,00	4,2096	,43665
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Output SPSS 24, 2023

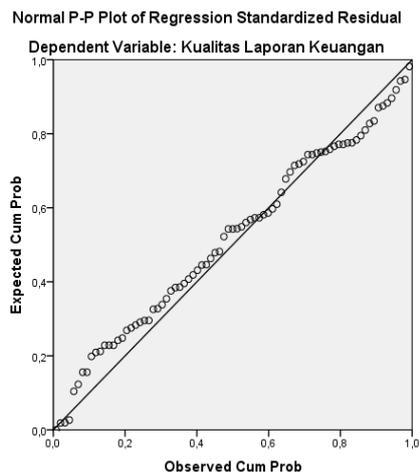
Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah data pada penelitian ini adalah sebesar 81 data. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) mempunyai nilai paling kecil yaitu 2,92 dan nilai yang paling besar adalah 5,00. Nilai rata-rata dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) adalah 4,3067 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,41983. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) memiliki nilai paling rendah yaitu 3,20 dan nilai paling tinggi adalah sebesar 5,00. Nilai rata rata dari Sistem Pengendalian Internal (X_2) adalah 4,0012 dengan nilai standar deviasi yaitu 0,40942. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) memiliki nilai paling rendah yaitu 3,50 dan nilai paling tinggi sebesar 5,00. Nilai rata rata dari Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) adalah 4,5432 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,38687.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai paling rendah yaitu 2,90 dan nilai paling tinggi adalah 5,0. Nilai rata-rata Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah 4,6160 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,36485. Variabel Komitmen Organisasi (Z) memiliki nilai paling rendah yaitu 3,0 dan nilai paling tinggi sebesar 5,0. Nilai rata-rata Komitmen Organisasi adalah (Y) 4,2096 dengan standar deviasi sebesar 0,43665.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas dilaksanakan dengan melakukan pengujian grafik P-P Plot untuk menguji residual model regresi (Ghozali, 2018a) tampak pada gambar 2 berikut:



Sumber: Output SPSS 24, 2023

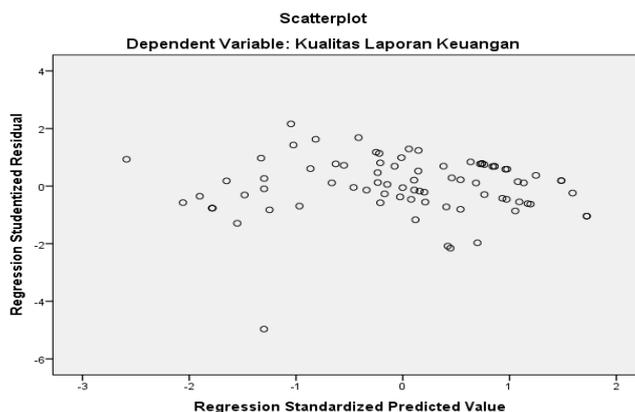
Gambar 2. Uji Normalitas

Grafik normal probability plot memperlihatkan penyebaran data pada daerah garis diagonal dan ikut searah garis diagonal, sehingga model regresi tersebut dapat dikatakan sebagai asumsi normalitas.

4.3.2. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apabila varians residual suatu observasi dalam suatu model regresi tidak sama dengan observasi lainnya. Apabila perbedaan risiko antara pengamatan

yang satu dengan pengamatan yang lain sama saja maka akan disebut homoskedastisitas, dan bila berbeda-beda akan disebut sebagai heteroskedastisitas. Sebaik-baiknya sebuah model regresi adalah yang merupakan homoskedastis atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *scatterplot*. Berikut merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas berikut:



Sumber: Output SPSS 24, 2023

Gambar 3. Scatterplot

Hasil uji heterokedastisitas dengan *scatterplot* seperti yang disajikan pada gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model.

4.3.3. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model

regresi yang baik adalah dengan tidak seharusnya terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018b). Untuk menentukan apakah terdapat multikolinieritas dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai VIF dan toleransi serta menganalisis matrix korelasi variabel-variabel bebas.

Tabel 2. Pengujian Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PSAP	,937	1,067
	SPI	,831	1,204
	PTI	,814	1,229

Sumber: Output SPSS 24, 2023

Berdasarkan hasil dari pengujian multikolinearitas tersebut maka penelitian ini tidak terjadi uji multikolinearitas berdasarkan dari nilai Tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan berdasarkan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10,00 yang berarti kesimpulan penelitian tidak terjadi uji multikolinearitas.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk dapat melihat apabila terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah

bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah bebasnya suatu regresi dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson.

Hasil dari pengujian autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,823 ^a	,677	,665	1,793

Sumber: Output SPSS 24, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1.793, nilai ini akan dapat dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 81 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3), maka diperoleh nilai du sebesar 1.7164. Nilai DW sebesar 1.793 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1.7164 dan kurang dari (4-du) atau $4 - 1.7164 = 2.2836$. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji Pengaruh Komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas SDM terhadap keandalan pelaporan keuangan. Adapun hasil persamaan regresi linier berganda ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi seperti tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2,218	,256		8,670	,000
	PSAP	,295	,043	,458	6,850	,000
	SPI	-,247	,043	-,409	-5,756	,000
	PTI	,466	,050	,668	9,305	,000

Sumber: Output SPSS 24, 2023

Dari tabel Sig. di atas dapat diinterpretasikan sebagai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan sig. (0,000) dengan taraf $\alpha = 5\%$. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan sig. (0,000) dengan taraf $\alpha = 5\%$. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh

terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan sig. (0,000) dengan taraf $\alpha = 5\%$

4.5. Uji Interaksi (MRA)

Tabel 5 berikut ini menyajikan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) interaksi antar variabel:

Tabel 5. Uji Interaksi (MRA) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,619	2,587		1,399	,166
	PSAP	,862	,492	1,341	1,753	,084
	SPI	-1,681	,443	-2,783	-3,797	,000
	PTI	,785	,537	1,125	1,461	,148
	KO	-,216	,609	-,353	-,355	,724
	PSAP*KO	-,148	,118	-1,563	-1,248	,216
	SPI*KO	,331	,103	3,863	3,207	,002
	PTI*KO	-,082	,130	-,900	-,629	,532

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2018). Untuk melihat apakah variabel Komitmen Organisasi (Z) mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) digunakan analisis MRA (Moderating Regression Analysis).

Berdasarkan Persamaan regresi $Y = 3,619 + 1.099 (0.191) + 0.027 (3.257) + 0.661 (-0.098)$, Hasil perhitungan uji MRA tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Variabel Komitmen Organisasi mampu

memoderasi Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi, sedangkan tidak pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

4.6. Uji F

Tujuan Uji F dilakukan adalah agar dapat mengetahui variabel-variabel penjelasan yang dipakai dalam model apakah memiliki pengaruh dengan bersama-sama atau tidak pada variabel yang akan dijelaskan dengan memakai uji F. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan secara bersama-sama.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,948	3	1,316	53,840	,000 ^b
	Residual	1,882	77	,024		
	Total	5,831	80			

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Berdasarkan table 6 diatas tampak bahwa nilai Fhitung sebesar 53,849 lebih besar dari Ftabel 2,722 (f tabel= k ; n-k = 3 ; 81-3 = 3;78 = 2,722) dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil ini memberikan makna bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi.

4.7. Uji Statistik (uji t)

Tujuan dari pengujian uji t ini ialah agar dapat mengetahui jika variabel-variabel penjelasan yang dipakai dalam model memiliki pengaruh atau tidak pada variabel yang ingin dijelaskan dengan memakai uji t. Pengujian ini dilakukan agar dapat menguji pengaruh penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 7. Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. ,000
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,218	,256		8,670	
	PSAP	,295	,043	,458	6,850	,000

SPI	-,247	,043	-,409	-5,756	,000
PTI	,466	,050	,668	9,305	,000

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t pada table 7 diperoleh persamaan regresi berganda yaitu $Y = 2,218 + 0,295X_1 + (-0,247)X_2 + 0,466 X_3$ maka dapat dijelaskan bahwa:

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.8. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi/R² digunakan agar dapat mengetahui seberapa jauh model mampu menjelaskan variasi dependen (Ghozali, 2018b). Menurut Ghozali

(2018) kelemahan yang paling utama dalam penggunaan koefisien determinasi (R²) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap kali ada tambahan satu variabel independen, maka R² pasti tetap akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen. Oleh karena itu ada anjuran dari banyak peneliti yang mengatakan agar dapat menggunakan nilai Adjusted R² Square pada saat mengevaluasi memilih model yang terbaik. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkann variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada table 8 dibawah ini :

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,810 ^a	,656	,623	,1642	1,524

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Tabel 8 di atas memperlihatkan hasil uji determinasi bahwa nilai adjusted R square menghasilkan nilai sebesar 0,623 yang menyatakan bahwa 62,3% besarnya kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sedangkan sisanya 37,7% (100% - 70,3%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.9. Pembahasan

4.9.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik penerapan standar akuntansi pemerintah punya tingkat signifikan 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$ yang berarti menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Jawaban responden pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah diketahui memiliki nilai terendah adalah 1 sebesar 2% sedangkan untuk nilai tertinggi adalah 5 sebesar 41%. Rata-rata (mean) jumlah nilai jawaban penerapan standar akuntansi pemerintah adalah 4,3. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata responden mengerti dan memahami penerapan standar

akuntansi pemerintah seharusnya dalam masing-masing organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Daerah dan Pusat harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan ketentuan dari SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sebuah penerapan prinsip akuntansi yang dilakukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar kualitas laporan keuangan meningkat baik di pusat begitu pula di daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, akan membuat pemerintah daerah memiliki kualitas informasi yang baik, (Nyoman, et al, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas bisa dihasilkan dengan penerapan SAP oleh pemerintah daerah sehingga memiliki dapat memiliki informasi yang berguna, selain itu juga penerapan SAP yang efektif dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sanjaya, 2017) bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut (Rahayu Sri dan Yudi, 2020) juga mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Julita dan Susilatri (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

4.9.2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Sistem pengendalian internal adalah sebuah pengendali terutama dalam pengelolaan sistem informasi dengan tujuan akurasi yang pasti dan informasi yang lengkap. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal secara menyeluruh. Hal ini berhubungan dengan efektivitas laporan keuangan yang berkualitas yang dihasilkan dari baik buruknya implementasi dari sistem pengendalian internal.

Hasil uji statistik sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi 0,757 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan ditolak.

Jawaban responden pada variabel sistem pengendalian internal diketahui nilai terendah adalah 1 sedangkan untuk nilai tertinggi adalah 5 sehingga rata-rata (mean) jumlah nilai jawaban sistem pengendalian internal adalah 4,0. Hal ini cukup menunjukkan nilai yang baik, namun tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas keuangan.

Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian intern yang baik apabila tidak diterapkan secara efektif akan menimbulkan banyak ketidaksesuaian antara proses yang berjalan dengan peraturan yang berlaku, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak semakin baik. Seperti halnya pada jawaban responden menggambarkan bahwa menindaklanjuti temuan/review dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat masih belum sering dilakukan yang ditunjukkan dengan nilai 78%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septarini dan Papilaya, 2016) dan (Goreti, 2019) yang mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gianya mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan (Mahaputra dan Wayan Putra, 2014). Begitu pula di Kabupaten Tabanan yang berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (Sudianti, 2015).

4.9.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik pemanfaatan teknologi informasi memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini bahwa pemanfaatan

teknologi informasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan diterima.

Jawaban responden pada variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai terendah adalah 1 sedangkan untuk nilai tertinggi adalah 5 sehingga rata-rata (mean) jumlah nilai jawaban pemanfaatan teknologi informasi adalah 4,5. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata responden cukup paham dan mengerti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam masing-masing organisasi perangkat daerah, terlihat dari persentase jawaban responden yang memberikan nilai 5 sebanyak 53% dan nilai 4 sebanyak 43%.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan diterima. Pemerintah baik itu Pusat maupun Daerah harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang maju agar dapat kemampuan dalam pengelolaan keuangan meningkat, serta dapat kepada pelayanan publik tentang Informasi Keuangan. Kesempatan semua orang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara tepat dan akurat dapat dilakukan jika teknologi informasi berpotensi dengan pesat dimanfaatkan secara luas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrianto & Rahmawati, 2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian lainnya dengan hasil yang serupa juga dilakukan oleh (Imelia et al., 2021). Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Goreti, 2019) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.9.4. Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan tingkat signifikansi 0,054 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara komitmen organisasi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang berarti menunjukkan hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan ini ditolak.

Tingkat komitmen organisasi yang dimiliki pegawai tidak memberikan pengaruh pada hubungan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada kualitas laporan keuangan. Pada jawaban responden yang diberikan, terlihat nilai terendah adalah 3 dengan persentase 14% dan nilai tertinggi yaitu 5 dengan persentase 35%. Rata-rata dari seluruh jawaban adalah 4,2.

Pada pernyataan bahwa “Saya merasa terikat secara emosional dengan OPD dimana saya bekerja” memiliki nilai persentase 81%, nilai persentase terendah dari indikator lainnya. Hal ini juga mencerminkan pegawai masih jarang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat untuk berusaha atau bekerja keras dalam organisasi. Penyebabnya bisa dikarenakan pernyataan “Saya akan tetap bekerja di OPD ini kecuali apabila dipromosikan atau dimutasi ke OPD lain” yang memiliki nilai persentase rendah kedua yaitu 84%. Walau demikian apa yang telah ditugaskan tetap akan dilaksanakan sesuai tanggung jawab yang diberikan dan dilihat dari rata-rata latar belakang Pendidikan pegawai adalah strata s1 dan memiliki posisi yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan cukup sesuai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2018) dan (Sorusai, 2019) yang memperlihatkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berkebalikan dengan penelitian (Rahayu Sri dan Yudi, 2020) yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderasi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dengan moderasi komitmen organisasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

4.9.5. Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan tingkat signifikan 0,025 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang menyatakan bahwa ada interaksi antara komitmen organisasi dengan sistem pengendalian internal yang artinya hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan ini diterima. Pada jawaban responden yang diberikan, terlihat nilai terendah adalah 3 dengan persentase 14% dan nilai tertinggi yaitu 5 dengan persentase 35%. Sedangkan untuk nilai 4 berada di persentase 51%. Rata-rata dari seluruh jawaban adalah 4,2.

Kaitan antara baik atau buruknya Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi efektifitas penyusunan laporan keuangan. Tingginya Komitmen organisasi dapat membuat pengaruh yang kuat antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai menunjukkan komitmen yang tinggi terlihat dari persentase indikator tertinggi yaitu 86% pada pernyataan “Saya bertanggung jawab dengan pekerjaan ini karena sesuai dengan keinginan dan minat saya”. Para pegawai merasa sangat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan terutama jika pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan dan minat sehingga dikerjakan dengan ada rasa kemauannya sendiri bukan

hanya sekadar kewajiban saja. Pegawai juga melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik walau tanpa diawasi secara konsisten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fathia et al., 2020) menunjukkan hasil yang positif bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi. Sebaliknya, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sorusai, 2019)

4.9.6. Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil uji statistik menunjukkan tingkat signifikan 0,009 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang menyatakan bahwa ada interaksi antara komitmen organisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang artinya hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan ini diterima.

Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi ini adalah agar proses penyajian laporan keuangan terbantu menjadi lebih cepat dan sesuai pada tenggat waktunya. Indikator pemanfaatan teknologi informasi memiliki jumlah nilai rata-rata yang tinggi yaitu 4,5. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi informasi telah dimanfaatkan secara baik.

Menurut (Fathia et al., 2020) Komitmen tinggi pada organisasi yang dimiliki oleh pegawai akan memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam mendedikasikan dukungan yang besar untuk mencapai tujuan organisasi dengan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan dengan baik agar laporan keuangan yang disajikan tersebut berkualitas dan tepat waktu. Bertambah tingginya Komitmen Organisasi, maka akan terlihat pula Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tinggi serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga tinggi. Terlihat dari hasil responden pada indikator komitmen organisasi dalam pernyataan tanggungjawab pada pekerjaannya berada pada persentase 86%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitroh, 2021) yang mengatakan bahwa Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, (Fathia et al., 2020) mengatakan bahwa Komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan penelitian (Andrianto & Rahmawati, 2018) juga mengungkapkan bahwa Komitmen Organisasi tidak

dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderat pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. Variabel komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
5. Variabel komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
6. Variabel komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak sempurna dan masih memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yang kedepannya diharapkan mampu teratasi untuk pada penelitian selanjutnya, keterbatasan tersebut itu antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian dalam pengamatan sehingga tidak semua responden terjangkau oleh peneliti
2. Proses pengumpulan data yang terbatas. Prosedur birokrasi pemerintah memakan cukup banyak waktu sehingga memperlambat pengiriman maupun dalam mengembalikan kuesioner.
3. Waktu penelitian bertepatan dengan salah satu acara besar pemerintah provinsi Jambi sehingga responden yang diminta tidak sedang berada di tempat dikarenakan sedang bertugas dalam acara tersebut.

5.3. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar dapat menambah beberapa jumlah variabel lain yang menjadi fenomena yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan metode wawancara agar data yang didapatkan lebih akurat dan jelas serta lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena peneliti dapat mengkomunikasikan secara langsung kepada responden terkait poin-poin kuesioner sehingga tidak terdapat kesalahan pemahaman atau salah tafsir dalam membaca pertanyaan.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan yang lebih baik terhadap responden agar responden dapat mengisi kuesioner dengan lebih termotivasi, serta netral dan objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan mampu mengembalikan kuesioner sesuai dengan waktu yang ditetapkan

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja P. *Jurnal Profita*, 6(2), 1–19.
- Edlin, D. N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jom Feb*, 1(1), 1–15.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hartni. (2021). *Perilaku Organisasi*. Widina Bhakti Persada Bandung
- Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 149–163. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16112>
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama Dan I Wayan Putra. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan

- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Gianyar). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014):230-244.
- Nyoman, Ari., Anantawikrama, Tungga., Surya, Darmawan. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. Vol. 2 No. 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- PP No. 56 Tahun. (2005). *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Pujanira, P. (2017). *16643-40953-1-Sm. VI(4)*.
- Rahayu Sri dan Yudi, F. S. T. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 268–279.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Ka. *Fakultas Ekonomi Manajemen*, 4(1), 366–380.
- Sorusai, J. A. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178045>
- Sudianti, Ni Made. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta.
- Sumarni, & Pramuntadi, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perawat di RS PKU Muhammadiyah Bantul The Influence of Organizational Commitment towards Nurse Performances in PKU Muhammadiyah Hospital Bantul. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, Vol.5(ISSN 2477-0140), 154–164. www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id
- Wulandari, Mayang. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)